

No : 15/DIR/WN/I/2024

Badung, 30 Januari 2024

Lampiran : 1 gabung

Perihal : Laporan Tata Kelola tahun 2023

Kepada Yth

Pimpinan Perbarindo dan Majalah Media BPR

Pusat Komplek Patra II No.46

Jl Ahmad Yani – By Pass, Cempaka Putih Jakarta Pusat

10510

Dengan hormat,

Menunjuk POJK No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan SE OJK No.5/SEOJK.03/2016 dan SE OJK No.24/SEOJK.03/2020 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS dan POJK No. 03./2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS maka bersama ini kami sampaikan Laporan Tata Kelola tahun 2023 ( Laporan terlampir ).

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

PT. BPR Wahyu Nirmala



I Made Nirmala, SMD, MM,  
Direktur Utama

# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

**PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta**

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

665702-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-600990-29012024140159

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

bpr\_wahyunirmala@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-29 14:01:59



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	Bank telah memiliki kebijakan dan SisDur penyelesaian mengenai benturan kepentingan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Dalam halnya terjadi benturan kepentingan Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan PE tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR dan tidak melakukan transaksi benturan kepentingan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Segala sesuatu yang terkait dengan Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan rapat.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

## Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.04.00

## Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;  b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana;  dan  c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak ikut dalam proses penyaluran dana.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang - undangan yang lain yang berkaitan dengan perbankan.
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	2	PE yang membawahi fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi Operasional.
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Satuan Kerja Kepatuhan atau pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah melakukan pengkinian Sistem dan Prosedur Kepatuhan
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	BPR telah memiliki ketentuan internal mengenai tugas dan tanggung jawab mengenai fungsi kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah dalam rangka untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh POJK dan ketentuan lainnya.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah melakukan sosialisasi dan mengikuti pelatihan-pelatihan baik secara daring maupun luring tentang ketentuan-ketentuan terkini.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan pemantauan dan selalu menjaga Kepatuhan terhadap Komitmen kepada OJK dan peraturan perundang-undangan.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Seluruh kebijakan dan ketentuan sistem dan prosedur yang dimiliki dan dilakukan BPR sudah sesuai dengan POJK dan undang-undang yang berlaku
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	PE yang menangani fungsi kepatuhan sudah melakukan review dan telah merekomendasikan terkait dengan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan sistem maupun prosedur sesuai dengan ketentuan POJK dan perundang-undangan yang berlaku
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	dalam tahun 2023 tidak terdapat pelanggaran yang signifikan.

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah membuat laporan secara berkala dan menyampaikannya kepada Direktur utama dan di tembuskan kepada dewan Komisaris
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Jika terjadi penyimpangan Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan akan meyampaikan laporan khusus kepada OJK
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	BPR telah memiliki PE Audit Intern.
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	Dalam melakukan fungsi audit, PE Audit interna telah menyusun RKAT 2024 yang telah disetujui Direktur Utama dan Dewan Komisaris
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	PE Audit intern melaksanakan tugas secara independen terhadap satuan kerja Operasional baik terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana.
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	Pe Audit Intern dalam melakukan fungsi audit bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	BPR telah memiliki rencana pengembangan SDM terkait dengan fungsi Audit Internal
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	Penerapan Fungsi Audit sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dengan melihat seluruh aspek yang dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan Masyarakat.

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib melakukan kaji ulang dan menyampaikan laporan kaji ulang.
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Pelaksanaan Fungsi Audit Internal telah dilakukan secara memadai dan Independen.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	Telah dilakukan peningkatan mutu SDM terkait dengan penerapan fungsi audit internal melalui pelatihan baik secara offline maupun Online.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	PE audit Intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan Audit Kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta di tembuskan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi kepatuhan.
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyampaikan laporan pokok pokok Audit Internal Kepada OJK
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	kepada OJK, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	2	BPR telah menyampaikan laporan pengangkatan dan pemberhentian PE Audit Intern sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	Penugasan Audit kepada AP dan AKP telah memenuhi aspek legalitas perjanjian kerja
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	Telah dilakukan RUPS dalam penunjukan AP dan KAP dalam Pelaksanaan Audit
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah melaporkan Hasil Audit KAP dan Manajemen Letter Kepada OJK
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil Audit dan Manajemen Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan sudah disampaikan pada BPR secara tepat waktu.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang Lingkup Audit

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	2	BPR telah memiliki PE yang bertanggung jawab terhadap penerapan Fungsi Manajemen Risiko
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR sudah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko dan penetapan Limit Risiko
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	BPR sudah mencantumkan pengelolaan risiko yang melekat pada setiap produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	2	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko dan Direksi telah memiliki standard klasifikasi limit transaksi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, mengevaluasi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko, serta memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	BPR telah menerapkan sistem pengendalian Internal yang menyeluruh
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR saat ini menerapkan risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan serta risiko likuiditas.
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Untuk saat ini BPR memiliki sistem informasi yang cukup memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Direksi sudah melakukan pengembangan budaya awarness terhadap manajemen risiko pada seluruh jenjang karyawan melalui pelatihan pelatihan dan atau sosialisasi baik offline maupun online.
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada OJK
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR akan melakukan penyampaian laporan kepada OJK terkait dengan Produk dan AKtivitas baru yang di miliki BPR
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Form B.08.00

## Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BPR telah memiliki SOP atau PKPB mengenai BMPK sesuai dengan POJK yang terbaru, dan BPR memiliki standar monitoring serta penyelesaian kredit bermasalah.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR telah melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan, sistem dan prosedur BMPK sesuai dengan ketentuan berlaku.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Dalam hal Proses pemberian kredit oleh BPR kepada Pihak terkait dan atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Internal maupun ketentuan OJK serta selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan Pemberian kredit kepada pihak terkait telah dilaporkan secara berkala kepada OJK
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Tidak terjadi pelanggaran dan Pelampuan BMPK

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	RBB tahun 2024 telah disusun Oleh Direksi dan sudah mendapatkan persetujuan dari Dewan komisaris dan telah dilaporkan ke OJK
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	RBB tahun 2024 yang disusun sudah menggambarkan strategi jangka pendek menengah serta rencana penyelesaian permasalahan BPR sesuai dengan ketentuan
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	RBB yang disusun telah di dukung sepenuhnya oleh seluruh pemegang saham dalam rangka pengembangan bisnis BPR jangka pendek, menengah dan jangka panjang
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	RBB yang disusun telah mempertimbangkan faktor External maupun internal serta selalu mengutamakan prinsip kehati hatian dan dengan menerapkan manajemen risiko.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan Komisaris telah melaksakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis BPR.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	RBB Telah dilaporkan ke OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Saat in BPR telah memiliki sistem Informasi yang mendukung pelaporan keuangan dan non keuangan serta didukung oleh SDM yang memadai sehingga menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun laporan Keuangan Publikasi secara Triwulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun laporan tahunan yang memuat informasi umum, laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah melaksanakan transparansi Informasi mengenai produk dan layanan dan atau penggunaan data nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun dan menyajikan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan keuangan tahunan telah ditandatangani oleh Direksi dan dipublikasikan sesuai dengan ketentuan OJK
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	BPR telah mengirimkan Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan nasabah telah disampaikan secara tepat waktu
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023



## LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Penerapan Tata Kelola  
PT. BPR Wahyu Nirmala Tahun 2023**

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:


- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkonomian Rakyat tanggal 31 Maret 2015
- 2 POJK No. 03/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 04 Maret 2022
- 3 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkonomian Rakyat tanggal 14 Desember 2020
- 4 Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkonomian Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT. BPR Wahyu Nirmala selama tahun 2023. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkonomian Rakyat (BPR).

Badung, 26 Januari 2024

PT. BPR Wahyu Nirmala

Menyetujui



Luh Putu Hartami, SE., MM., MBA.  
Komisaris Utama



Dibuat



I Made Narita, SE., AMD., MM.  
Direktur Utama

## HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

### A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT. BPR Wahyu Nirmala
Alamat	: Jl. Raya Buduk No. 7 Mengwi Badung
Nomor Telepon	: 03618449393
Posisi Laporan	: Desember 2023
Modal Inti	: Rp12.599.640.442
Total Aset	: Rp146.593.768.264

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR Wahyu Nirmala Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 1.9 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.5	0.3
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.84	0.276
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2	0.2
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2	0.2
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2	0.2
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2	0.05
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2	0.2
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2	0.15
10	Rencana Bisnis BPR	2	0.15
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2	0.15
<b>Nilai Komposit</b>			<b>1.9</b>
<b>Peringkat Komposit</b>			<b>2</b>
<b>Predikat Komposit</b>			<b>Baik</b>

## **B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri**

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

### **1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.5)**

Anggota Direksi telah melakukan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi secara maksimal.

### **2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.84)**

Dewan Komisaris telah melakukan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan komisaris dalam hal pengawasan BPR.

### **3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)**

BPR saat ini posisi modal inti kurang dari 50 Milyar jadi belum ada Fungsi Komite.

### **4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2)**

BPR telah memiliki kebijakan dan Sistem Prosedur terkait dengan benturan kepentingan.

### **5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2)**

BPR telah memiliki kebijakan dan Sistem Prosedur tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan yang mana dalam pelaksanaannya di monitoring oleh PE Kepatuhan dan Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

### **6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2)**

BPR telah memiliki SDM dalam melakukan penerapan Fungsi Audit Intern.

### **7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2)**

BPR telah melakukan penunjukan Audit Eksternal dalam melakukan fungsi audit ekstern sesuai dengan ketentuan yang berlaku

### **8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2)**

BPR telah memiliki Kebijakan Sistem dan Prosedur dalam hal Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

### **9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2)**

BPR telah melakukan penyesuaian terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit yang terbaru.

### **10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2)**

BPR Telah membuat RBB 2024 yang telah di setuju Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan telah dilaporkan Ke OJK

**11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2)**

BPR telah melakukan Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan melalui media cetak dan elektronik

**C. Kesimpulan Umum**

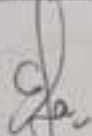
Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

BPR telah melakukan Self Assasment Penerapan Tata Kelola dengan Nilai Komposit 1.9 dan peringkat Komposit 2 dengan kategori "BAIK"

Badung, 26 Januari 2024

PT. BPR Wahyu Nirmala

Menyetujui



Luh Putu Hartami, SE, MM, MBA,  
Komisaris Utama



Dibuat



I Made Nartha, SE, AMD, MM,  
Direktur Utama

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : Jl. Raya Buduk No. 7 Mengwi Badung

Nomor Telepon : 03618449393

Penjelasan Umum : BPR menyadari bahwa penerapan GCG yang baik menjadi pondasi utama dalam menjalankan usaha. Melalui GCG yg baik, BPR dapat meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan, meningkatkan ketahanan usaha dalam jangka panjang, meningkatkan kinerja perusahaan, dan kepercayaan para pengguna jasa keuangan. Dengan penerapan GCG secara konsisten dan berkesinambungan yang didukung oleh integritas dan komitmen yang tinggi serta peran aktif dari berbagai perangkat dalam struktur organisasi, diharapkan GCG menjadi bagian dari budaya BPR untuk mencapai 5 ( lima ) pilar dasar GCG yaitu keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency) , kesetaraan dan kewajaran (fairness) atau TARIF. Penerapan 5 (lima) pilar dasar tersebut diyakini oleh BPR sebagai instrumen yang dapat diandalkan dalam mengatur segala aspek bisnis yang dijalankan, baik oleh Dewan Komisaris, Direksi dan segenap karyawan BPR, sehingga diharapkan dapat menciptakan keseimbangan dalam operasional usaha secara menyeluruh.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	I Made Nartha, SE.,AMD.,MM.	Direktur Utama	Tanggung Jawab : - Terkoordinasinya semua aktivitas Bank di bidang operasional, kredit dan pemasaran di kantor pusat maupun cabang dengan sebaiknya.. - Tercapainya pertumbuhan Bank yang optimal, sehat dan efisien.. - Tercapainya target sesuai anggaran yang ditetapkan.. - Bertanggung jawab atas penerapan dan pengawasan program APU PPT.. - Menciptakan struktur pengendalian intern & terselenggaranya fungsi audit intern.. Tugas : - Mewakili Bank di dalam & luar Pengadilan tentang segala hal & dalam segala kejadian, menjalin kerja sama dengan pihak ketiga serta menjalankan segala tindakan kepengurusan maupun kepemilikan dengan batasan yang jelas.. - Bekerja sama dengan Direktur menyusun rencana bisnis Bank.. - Membuat dan menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah dan oleh Dekom setelah tahun buku Perseroan berakhir.. - Memastikan penerapan & pelaksanaan tentang perlindungan konsumen.. - Mengkoordinasikan aktifitas penghimpunan dana & penyaluran kredit secara optimal.. - Menjaga keseimbangan likuiditas, pendanaan, perkreditan & permodalan secara optimal untuk mencapai TKS yang baik.. - Memastikan laporan keuangan tepat waktu & benar.. - Memastikan SOP perbankan dilaksanakan sesuai ketentuan.. - Meningkatkan, memelihara dan mengamankan aset perusahaan.. - Menindaklanjuti hasil pemeriksaan OJK, KAP, AI dan instansi berwenang lainnya.. - Meyakinkan kelayakan usaha & memastikan kondisi agunan dapat dilakukan kunjungan untuk mengetahui kelayakan usaha calon debitur.. - Menyelesaikan kredit bermasalah melalui jalur hukum dengan tetap berpedoman pada prinsip cost and benefit.. - Meningkatkan keterampilan & profesionalisme SDM.. - Mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan agar efisien & produktif.
2	Ni Komang Parwati, SE	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Tanggung Jawab : - Terkoordinasinya aktivitas Bank di bidang operasional, penerapan kepatuhan, pemasaran produk & pengelolaan sumber daya Bank.. - Menjamin penerapan GCG pada setiap kegiatan usaha Bank di seluruh jenjang organisasi.. - Terjaganya TKS Bank.. - Tercapainya RBB.. - Terlaksananya penerapan & pengawasan APU PPT.. - Menjamin terlaksananya kepatuhan, prudent banking dan manajemen risiko pada setiap kegiatan usaha Bank.. - Menindaklanjuti temuan audit & rekomendasi dari saat kerja yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan auditor.. Tugas : - Membuat risalah RUPS & risalah Direksi.. - Bekerja sama dengan Direktur Utama menyusun RBB & menyusun strategi untuk mencapai RBB.. - Menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah tahun buku Perseroan berakhir.. - Memastikan penerapan & pelaksanaan tentang perlindungan konsumen.. - Menjaga keseimbangan likuiditas, pendanaan, perkreditan & permodalan secara optimal untuk mencapai TKS yang baik.. - Memastikan laporan keuangan benar & tepat waktu.. - Menindaklanjuti hasil pemeriksaan AI, KAP, OJK maupun instansi berwenang lainnya.. - Meningkatkan keterampilan & profesionalisme SDM.. - Mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki Bank agar efisien & produktif.. - Menetapkan rencana pendidikan & pelatihan bagi pegawai.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

a.Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.. b.Tingkat Kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi sehat.. c.Direksi telah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia sesuai rekomendasi Dewan Komisaris yaitu : Melakukan evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan. Pemberian sanksi telah dilaksanakan kepada pegawai yang melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku. Apresiasi juga telah diserahkan bagi pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi BPR Wahyu Nirmala.. d.Monitor secara ketat debitur yang terdampak dampak COVID-19 sudah dilaksanakan.. e.Temuan pemeriksaan OJK telah tuntas ditindaklanjuti sebelum batas waktu yang di tentukan OJK

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Luh Putu Hartami, SE.,MM.,MBA	Komisaris Utama	Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris :. 1).Sepanjang tahun 2022 Dewan Komisaris bersama telah menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 6 (enam) kali yang mencakup RBB tahun 2023. 2).Dewan Komisaris aktif merespon atas kondisi yang berpotensi membahayakan usaha BPR, sebagaimana terjadi sepanjang tahun 2021 diantaranya masih cukup tingginya rasio NPL dan meningkatnya pertumbuhan Lending, melalui nasehat dan pengawasan kepada Direksi.. 3).Dewan Komisaris aktif memberikan pengarahan, masukan dan terobosan-terobosan terkait dengan kompetensi dan pengembangan karyawan, kepatuhan terhadap peraturan (APU-PPPT, Manajemen Risiko, LPS dan Tata Kelola yang baik).. 4).Dewan Komisaris telah membangun komunikasi dengan Audit Internal dan Direksi untuk memitigasi risiko demi terselenggaranya tata kelola yang baik.. 5).Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, bebas dari tekanan yang dapat mempengaruhi objektivitasnya.. 6).Dewan Komisaris telah meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, KAP, Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas berwenang lainnya.. 7).Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris, terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit.



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	I Wayan Govinda Gotama Putra, SE.,MM.	Komisaris dan Independen	Tanggung jawab: 1. Memastikan Operasional BPR berjln sesuai dgn ketentuan berlaku.. 2. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jlannya pengurusan pd umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan & memberikan nasihat kepada Direksi.. Tugas : 1. Bersama Komisaris Utama melakukan pengawasan aktif terhadap Pelaksanaan APU,PPT dan PPPSPM yaitu : a. Memastikan adanya sistem identifikasi nasabah dan transaksi yang mencurigakan, sistem pencatatan yang baik untuk idntifikasi transaksi yang mencurigakan, Memantau pengkinian profil nasabah,penyusunan laporan trnsaksi yang mencurigakan, kebutuhan dan pelaksanaan pemberian pelatihan kepada karyawan mengenai program APU,PPT dan PPPSPM, Menerima dan melakukan analis atas laporan transaksi yang mencurigakan yang sudah disampaikan. 2. Bersama Komisaris Utama mengawasi kebijakan Direksi, melakukan pengawasan Aktif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan dan melaporkan hasil pengawasan kepada instansi yang berwenang scara semesteran, Menyetujui rncana kerja tahunan yang telah dbuat oleh Direksi, Menyetujui slrh standar operasional prsedur yang dbuat oleh Direksi, Memberikan nasihat/saran kepada Direksi, mengadakan rapat bulanan atau triwulnn, Mengevaluasi pelksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan,menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada pemegang saham, Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada instansi berwenang secara semesteran, Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya, Melaporkan kepada Perseroan tentang kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain, Mengelola BPR untuk sementara apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk smntara atau BPR tidak mempunyai seorang pun anggota direksi, untuk itu Dewan Komisaris melalui rapat Dewan Komisaris membrikan kekuasaan sementara kepada seorang anggota dewan komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. 4.Memantau rncana pengembangan dan pengdaan Teknologi Informasi Bank yang bersifat mendasar

#### Rekomendasi Kepada Direksi

a.Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.. b.Tingkat Kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi sehat.. c.Direksi telah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia sesuai rekomendasi Dewan Komisaris yaitu : Melakukkan evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan. Pemberian sanksi telah dilaksanakan kepada pegawai yang melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku. Apresiasi juga telah diserahkan bagi pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi PT BPR Wahyu Nirmalad.Monitor secara ketat debitur yang terdampak dampak COVID-19 sudah dilaksanakan.. d.Temuan pemeriksaan OJK telah tuntas ditindaklanjuti sebelum batas waktu yang ditentukan oleh OJK.. e.Semua temuan Audit Internal telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan internal control dalam melaksanakan tugas masing-masing.

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Form A.01.20

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

### BPR tidak memiliki komite

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Jumlah modal inti BPR masih di bawah 50 Milyard sehingga bpr belum diwajibkan memiliki Komite Audit, Komite Pemantu Risiko maupun Komite Remunerasi dan Nominasi.

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

**Posisi Laporan** : 31 Desember 2023

**BPR tidak memiliki komite**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

**BPR tidak memiliki komite**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

### Direksi tidak memiliki saham di BPR

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh Anggota Direksi PT BPR Wahyu Nirmala tidak memiliki saham di PT BPR Wahyu Nirmala

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

**Posisi Laporan** : 31 Desember 2023

### Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh Anggota Direksi PT BPR Wahyu Nirmala tidak memiliki saham pada perusahaan lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Ni Komang Parwati, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	I Made Nartha, SE.,AMD.,MM.	tidak ada	tidak ada	tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh Anggota Direksi PT BPR Wahyu Nirmala tidak memiliki hubungan keuangan dengan Anggota Direksi yang lain, dengan Dewan Komisaris maupun dengan Pemegang Saham.



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	I Made Nartha, SE.,AMD.,MM.	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Ni Komang Parwati, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota direksi yang lainnya, dengan Dewan Komisaris serta dengan Pemegang Saham.

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

**Posisi Laporan** : 31 Desember 2023

### Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham di PT BPR Wahyu Nirmala

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham di perusahaan lain.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Luh Putu Hartami, SE.,MM.,MBA	tidak ada	tidak ada	Dr.dr. Gede Wirya Kusuma Duarsa,Sp.u(K).,MKes - Suami
2	I Wayan Govinda Gotama Putra, SE.,MM.	tidak ada	tidak ada	tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Sesama anggota dewan komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota dewan komisaris lainnya, Komisaris Utama memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali. Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan Komisaris Utama maupun dengan Pemegang Saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Luh Putu Hartami, SE.,MM.,MBA	tidak ada	tidak ada	Dr.dr. Gede Wirya Kusuma Duarsa,Sp.U(K).MKes. - Suami, dr. Gede Wirya Diptanala Putra Duarsa.S.Ked. - Anak, dr. Nyoman Wirya Duarsa,SpKK - Mertua
2	I Wayan Govinda Gotama Putra, SE.,MM.	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada Hubungan keluarga antara sesama anggota dewan komisaris, dengan Direksi tetapi Komisaris Utama memiliki Hubungan keluarga dengan semua Pemegang Saham.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	557400671	2	211411600
2	Tunjangan	2	399960671	2	22661600
3	Tantiem	2	184672945	2	92322623
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	<b>Total</b>		<b>1142034287</b>		<b>326395823</b>

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

- Untuk daftar gaji Dewan Komisaris dibayarkan untuk 1 orang sampai dengan bulan Agustus tahun 2023, selanjutnya ada 2 Dewan komisaris sampai dengan posisi desember 2023. - Untuk data tunjangan Komisaris dibayarkan untuk 1 orang sampai dengan bulan Agustus tahun 2023, selanjutnya ada 2 Dewan Komisaris sampai dengan posisi desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	tidak ada	tidak ada
2	Transportasi	Mobil Operasional (2)	tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	BPJS kesehatan (2)	BPJS Kesehatan (2)
4	Fasilitas lainnya	tidak ada	tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

- Untuk BPJS Kesehatan Komisaris dibayarkan 1 orang sampai dengan bulan Agustus tahun 2023, sedangkan dari Agustus 2023 sampai dengan Desember 2023 ada 2 Dewan komisaris.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	13,48	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,66	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	2,10	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,95	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	0,74	1

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Gaji yang diterima pegawai telah sesuai dengan kesepakatan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja.



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	07-02-2023	1	- Performa Neraca Desember 2022. - RBB tahun 2023. - Hasil Audit KAP. - Isu Strategis 2023
2	16-03-2023	1	- Target dan Realisasi Neraca per 28 Februari 2023. - Evaluasi Kinerja bulan Februari 2023. - Follow up hasil audit KAP
3	15-04-2023	1	- Target dan Realisasi Neraca per 31 Maret 2023. - Evaluasi Kinerja. - Tindak lanjut Revisi RBB 2023. - Isu Strategis
4	05-07-2023	1	- Roadmap BWN 3(tiga) Tahun Terakhir. - Isu Strategis. - Strategi Pencapaian Target tahun 2023.
5	19-09-2023	2	- Hasil Pemeriksaan Audit dikantor Cabang. - Pembahasan SMS Notifikasi. - Pembahasan perlu adanya marketing Digital. - Penyusunan laporan Individual Risk Assasment (IRA) sesuai dengan POJK no 8 tahun 2023

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dalam Kurun Waktu Tahun 2023 telah diadakan 5 kali rapat oleh Dewan Komisaris

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Luh Putu Hartami, SE.,MM.,MBA	5	0	100,00
2	I Wayan Govinda Gotama Putra, SE.,MM.	1	0	20,00

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Komisaris telah hadir dalam rapat yang di selenggarakan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama Tahun 2022 tidak ada penyimpangan atau Fraud internal

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	1	0
Total	1	0

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dalam kurun waktu tahun 2023 ada satu permasalahan Hukum yang di hadapi BPR yaitu adanya gugatan terkait kredit bermasalah atas Nama I Ketut Erawan yang saat ini masih dalam proses penyelesaian.

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

**Posisi Laporan** : 31 Desember 2023

### Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dalam kurun waktu tahun 2023 tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan. BPR akan selalu berupaya untuk menghindari transaksi yang mengandung benturan kepentingan

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

**Posisi Laporan** : 31 Desember 2023

**Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik**

Nama BPR : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta  
Posisi Laporan : 31-12-2023  
Alamat : Jl. Raya Buduk No. 7 Mengwi Badung  
Nomor Telepon : 03618449393  
Modal Inti BPR : 12.599.640.442,00  
Total Aset BPR : 146.593.768.264,00  
Bobot BPR : B  
Status Audit Ekstern : Diaudit  
Nilai Komposit : 1,9  
Peringkat Komposit : 2  
Analisis : BPR telah melakukan Self Assasment Penerapan Tata Kelola dengan Nilai Komposit 1.9 dan peringkat Komposit 2 dengan kategori BAIK

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,50	0,80	0,20	1,50	0.300	Anggota Direksi telah melakukan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi secara maksimal.
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,84	0,80	0,20	1,84	0.276	Dewan Komisaris telah melakukan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan komisaris dalam hal pengawasan BPR.
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	BPR saat ini posisi modal inti kurang dari 50 Milyar jadi belum ada Fungsi Komite.
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	BPR telah memiliki kebijakan dan Sistem Prosedur terkait dengan benturan kepentingan.
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	BPR telah memiliki kebijakan dan Sistem Prosedur tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan yang mana dalam pelaksanaannya di monitoring oleh PE Kepatuhan dan Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	BPR telah memiliki SDM dalam melakukan penerapan Fungsi Audit Intern.
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,80	0,20	2,00	0.050	BPR telah melakukan penunjukan Audit Eksternal dalam melakukan fungsi audit ekstern sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	BPR telah memiliki Kebijakan Sistem dan Prosedur dalam hal Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	BPR telah melakukan penyesuaian terhadap ketentuan Batas Maksimum Pembeaian Kredit yang terbaru.
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	BPR Telah membuat RBB 2024 yang telah di setujui Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan telah dilaporkan Ke OJK
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	BPR telah melakukan Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan melalui media cetak dan elektronik



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Nilai Komposit						1.9	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	BPR memiliki 2 anggota Direksi yang mana salah satu anggota direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Kabupaten yang berbeda pada propinsi yang sama
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Seluruh anggota Direksi tidak ada yang merangkap jabatan baik di perusahaan Non Bank maupun lembaga lainnya.
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Semua anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya dan dengan Dewan Komisaris.
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Selama tahun 2023 Direksi tidak pernah menggunakan jasa penasehat ataupun jasa konsultan lainnya.
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh Anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan secara independen serta tidak memberikan kuasa umum.
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direksi telah menindaklanjuti hasil temuan audit baik dari auditor internal, maupun auditor external.
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap akurat dan terkini sebagai bentuk pelaksanaan dari tugas dan tanggung jawab Direksi kepada Dewan Komisaris
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan Rapat Direksi yang bersifat strategis telah dilakukan secara musyawarah mufakat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Seluruh Anggota Direksi tidak pernah menggunakan BPR untuk kepentingan keluarga ataupun pribadi, dan Direksi hanya menerima remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditentukan dalam RUPS.
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Direksi telah mengikutsertakan karyawan dalam berbagai pelatihan baik pelatihan internal maupun external baik Online maupun tatap muka.
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Direksi secara kontinyu dan konsisten memberikan pemahaman tentang pentingnya Pruden Banking kepada seluruh karyawan.
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direksi telah memiliki dan melaksanakan tata tertib kerja Anggota Direksi.
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Direksi telah melakukan pertanggung jawaban pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS tahun buku 2022 yang di adakan pada tanggal 18 Maret 2023
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Direksi sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan Strategis BPR
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Direksi telah menuangkan risalah rapat dan dikomentasikan dengan baik termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions. Serta sudah dibagikan kepada seluruh Direksi.
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Telah dilakukan peningkatan pengetahuan keahlian dan kemampuan anggota Direksi dan Karyawan dalam mengelola BPR.
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Laporan Tata Kelola BPR dapat dilihat pada Website BPR, Asosiasi BPR dan Media atau Majalah Ekonomi.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Jumlah Dewan Komisaris per 31 Desember 2023 sebanyak 2 orang.
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah Anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan.
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh Dewan Komisaris telah lulus Uji kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS.
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Seluruh Dewan komisaris bertempat tinggal di Provinsi yang sama dengan kantor Pusat BPR.
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen;  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib memiliki Komisaris Independen, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib dewan komisaris
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	Dewan Komisaris tidak ada yang merangkap jabatan baik sebagai komisaris di BPR lain atau sebagai Direksi.
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	2	Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota dewan komisaris dan dengan anggota direksi.



Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	Komisaris Independen tidak ada memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham/hubungan keluarga dengan anggota Dewan komisaris yang lain
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,84	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi dengan cara selalu memberikan rekomendasi atau nasihat terkait dengan pemenuhan ketentuan dan Pruden Banking
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dewan Komisaris telah menuangkan tugas dan pengawasannya kedalam risalah rapat dewan komisaris
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan Komisaris tidak ikut terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan Operasional Bank dan Dewan Komisaris hanya memberikan persetujuan atas penyaluran dana pada pihak terkait sesuai dengan aturan yang berlaku.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan atas tindak lanjut yang dilakukan direksi atas temuan audit internal maupun external.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris telah melakukan Rapat sebanyak 5 kali dalam kurun waktu tahun 2023 dan dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris telah dilakukan secara musyawarah mufakat.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi maupun keluarga, Dewan komisaris tidak menerima keuntungan pribadi dari BPR selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam RUPS.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan atas tugas dan tanggung jawab Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris telah melakukan Rapat dewan Komisaris sebanyak 5 Kali dalam tahun 2023 dan telah di dokumentasikan dengan baik.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	BPR belum memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko karena modal inti BPR kurang dari 50 Milyar.
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	BPR belum memiliki Komite Audit karena modal inti BPR kurang dari 50 Milyar
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	BPR belum memiliki Komite Pemantau Risiko karena modal inti BPR kurang dari 50 Milyar
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	BPR belum memiliki Komite karena modal inti BPR kurang dari 50 Milyar
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	BPR belum memiliki Komite karena modal inti BPR kurang dari 50 Milyar
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	



Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Wahyu Nirmala d/h PT. BPR Candi Amerta

Posisi Laporan : 31 Desember 2023